



JELANG RELOKASI PKL MALIOBORO

DPRD Yogya Bentuk Pansus Sikapi Keresahan Pedagang

YOGYA (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta memutuskan membentuk panitia khusus guna menyikapi rencana relokasi pedagang kaki lima Malioboro sebagai tanggapan atas keresahan pedagang terkait rencana tersebut.

"Kami segera membentuk panitia khusus (pansus) yang hari ini akan diresmikan. Rencana ini sebenarnya sudah muncul sejak lama bahkan sebelum pedagang datang ke dewan," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko, Senin (17/1).

Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, Senin (17/1), datang ke DPRD Kota Yogyakarta untuk menyampaikan keberatan mereka atas rencana relokasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Danang, pansus yang nantinya terbentuk tersebut akan bertugas untuk menjadi mediator yang akan menjembatani komunikasi antara pedagang atau perwakilan PKL dengan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya kepala daerah dan instansi teknis yang

terlibat langsung dalam rencana relokasi tersebut.

"Tinggal dijadwalkan saja kapan waktu yang tepat untuk menggelar komunikasi dua arah yang melibatkan PKL dan pemerintah daerah," katanya seperti dilansir dari Antara.

Danang pun menyebut, komunikasi tidak hanya dilakukan ke Pemerintah Kota Yogyakarta tetapi dapat dibuka hingga ke jenjang Pemerintah DIY atau gubernur. "Supaya dialog yang terjalin menjadi lebih luas karena rencana ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta saja tetapi sampai ke DIY," ungkapnya.

Ia meyakini, dengan dialog yang baik antara pemerintah daerah dan PKL Malioboro akan menghasilkan konsep penataan yang lebih baik dan dapat di-

pahami oleh semua pihak. "Tujuan penataan adalah mencapai keseimbangan. PKL tidak menentang relokasi tetapi yang mereka harapkan adalah ditempatkan sebagaimana mestinya. Konsep penataan digagas bersama-sama," jelasnya.

Ia pun khawatir jika dua lokasi yang sudah disiapkan untuk relokasi yaitu di eks Bioskop Indra dan di lahan bekas Dinas Pariwisata DIY tidak akan mampu menampung seluruh PKL Malioboro.

"Beberapa lokasi masih memungkinkan seperti eks Hotel Mutiara dan eks Matahari yang tembus hingga belakang SMP Negeri 3 Yogyakarta karena rencananya sekolah tersebut akan dipindah ke Umbulharjo," katanya.

Sementara itu, salah satu PKL Malioboro yang tergabung dalam Paguyuban Lesehan PPLM Kelik Bektik Leksone mengatakan, lokasi yang akan digunakan untuk relokasi dirasa belum layak dan tidak sesuai harapan pedagang, khususnya lesehan. "Misalnya belum ada pembuangan air dan belum

ada sumber air bersih. Sampai sekarang pun belum ada kejelasan mengenai layout untuk penataan kuliner di lokasi relokasi," katanya.

Sedangkan Ketua Koperasi PPKLY Wawan Suhendra mengatakan mendapat informasi jika pada 22 Januari akan dilakukan syukuran di dua lokasi relokasi dan dilanjutkan proses relokasi pada 1-7 Februari. "Jika pada 8 Februari masih ada yang berjualan di tempat lama, maka akan ditertibkan. Jika benar rencana itu direalisasikan, maka sekarang tinggal menghitung hari saja," katanya.

PKL Malioboro berharap, rencana relokasi tersebut dihentikan sementara selama Pansus DPRD Kota Yogyakarta masih bekerja. "Kami merasa tidak mendapat informasi yang utuh terkait rencana relokasi. Informasi yang disampaikan tidak detail," katanya yang kembali meminta agar rencana relokasi ditunda karena pedagang ingin mengembalikan kondisi perekonomian akibat dampak pandemi. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005